

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan adalah aspek penting dari sebuah keberlangsungan negara. Aktivitas dasar di negara seperti ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya tidak akan berjalan dengan lancar apabila kondusivitas lingkungan terganggu akibat isu lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang sangat berdampak pada negara adalah isu perubahan iklim. Isu Perubahan iklim mulai dikenal sebagai isu penting pada tahun 1990 ketika dibentuknya UNFCCC (*United Nation Convention on Climate Change*).<sup>1</sup> Melalui konvensi ini, dunia internasional mulai menyadari bahwa adanya pemanasan global yang disebabkan oleh *greenhouse gas* (gas buang/gas emisi) akan membuat bencana perubahan iklim kenaikan suhu bumi, mencairnya es di kutub utara, hingga tenggelamnya sebagian besar negara-negara di dunia.

Dampak perubahan iklim yang melintasi lintas batas negara, mendorong negara-negara di dunia untuk berupaya memitigasi gas emisi melalui UNFCCC. Rencana ini disusun pada tanggal 11 Desember 1997 di Kyoto, Jepang dan diberi nama Protokol Kyoto.<sup>2</sup> Dalam Protokol Kyoto, terdapat 2 kategori entitas yaitu negara annex 1 (penghasil gas emisi besar) dan negara non-annex (penghasil gas emisi kecil).<sup>3</sup> Kewajiban dari negara annex 1 adalah menurunkan gas emisi rata-

---

<sup>1</sup> Andreas Pramudianto, "Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga *Paris Agreement* 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN menuju 2020" *Global VOL 18#Climate Change* (Mei 2016) hal 78

<sup>2</sup> Mitigasi adalah upaya mengurangi jumlah emisi yang dilepaskan ke atmosfer dan dalam mengurangi konsentrasi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang ada dengan meningkatkan jumlah bak (contohnya meningkatkan luas hutan) lihat <https://unfccc.int/resource/bigpicture/>

<sup>3</sup> Andreas Pramudianto Hal 78

rata 5% dari baseline 1990.<sup>4</sup> Ini membuat setiap negara memiliki target yang berbeda karena berpedoman berdasarkan komitmen mereka pada baseline 1990.<sup>5</sup> Sedangkan, negara-negara pada kategori non-annex hanya berkewajiban untuk melaporkan besaran emisi yang dihasilkan pertahun.<sup>6</sup> Negara annex 1 yang terdiri dari negara industri menganggap Protokol Kyoto tidak adil bagi negaranya. Sehingga, salah satu negara industri terbesar dunia yaitu Amerika Serikat (AS) dibawah pemerintahan Goerge J Bush memutuskan untuk tidak meratifikasi Protokol Kyoto yang berlaku hingga tahun 2012.

Tidak ikut sertanya AS dalam upaya memitigasi isu perubahan lingkungan mendapat protes dari berbagai pihak baik dari dunia internasional maupun aktor-aktor internal AS. Adalah Sierra Club, salah satu *Non-Governmental Organization* (NGO) yang sangat instens melakukan advokasi kepada pemerintahan Barack Obama kandidat presiden setelah Bush. Hal ini disebabkan Sierra Club merupakan kelompok kepentingan yang mendukung kampanye Obama melalui promosi publik atau *endorsment*.<sup>7</sup> Disamping itu, Sierra Club juga menampung donasi publik untuk Obama sebesar \$420.895.<sup>8</sup>

Pada tahun 2015 dilaksanakan konvensi lanjutan Protokol Kyoto di Paris, yang dikenal dengan *Paris Agreement*. Setelah negosiasi yang panjang, pada tahun 2016 Obama memutuskan untuk ikut meratifikasi bersama Tiongkok yang

---

<sup>4</sup> *Baseline* adalah titik acuan pada Protokol Kyoto yang mewajibkan negara untuk menurunkan gas emisinya berdasarkan banyaknya gas emisi yang dihasilkan oleh negara. Semakin banyak gas emisi yang dihasilkan, maka semakin besar kewajiban negara terkait. *Baseline* ini disepakati di Copenhagen pada tahun 1990.

<sup>5</sup> Andreas Pramudianto Hal 78

<sup>6</sup> Andreas Pramudianto Hal 79

<sup>7</sup> Michael Falcon. "Seira Club to Endorse Obama"

<https://thecaucus.blogs.nytimes.com/2008/06/19/sierra-club-to-endorse-obama/> (diakses tanggal 11 Mei 2019)

<sup>8</sup> Open Secret. "Sierra Club Independent expenditure, July 2009 for Election cycle 2008" <https://www.opensecrets.org/pacs/indexpend.php?cmte=C00135368&cycle=2008&txt> = (diakses tanggal 11 Mei 2019)

juga merupakan negara penyumbang emisi terbesar di dunia.<sup>9</sup> Bergabungnya AS dan Tiongkok dalam upaya memitigasi perubahan iklim akhirnya menemui babak baru dan potensi untuk berhasil yang lebih besar.

Setelah meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2016, satu tahun kemudian masa pemerintahan Obama berakhir setelah memimpin AS selama 2 periode. AS kemudian memasuki masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden baru periode 2017-2021. Terdapat 2 kandidat untuk menjadi Presiden AS yaitu Donald Trump dan Hilary Clinton. Keduanya pada saat masa kampanye memiliki agenda yang berbeda. Hilary yang fokus pada pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan, sedangkan Trump fokus untuk pengembangan industri pertambangan dan perminyakan AS. Dari 2 agenda yang berbeda tersebut, respon Hilary dan Trump terhadap *Paris Agreement* juga berbeda. Hilary berniat untuk melanjutkan agenda Obama yang telah meratifikasi *Paris Agreement*, sedang Trump dari awal memang meniatkan untuk melakukan *withdraw* (keluar).<sup>10</sup>

Pada tanggal 21 Januari 2017, pemilihan umum AS dimenangkan oleh Trump. Setelah terpilih sebagai president AS, tepat pada 1 Juni 2017 Trump mengumumkan keputusannya untuk keluar dari *Paris Agreement* sesuai janji kampanyenya. Trump mengemukakan bahwa *Paris Agreement* merupakan perjanjian yang sangat tidak adil bagi AS, sehingga Trump akan melakukan negosiasi perihal kewajiban AS di *Paris Agreement*. Dilansir dari pidato

---

<sup>9</sup> Jay Fajar. “ Amerika dan Tiongkok Meratifikasi Paris Agreement Apa Pengaruhnya Untuk Indonesia”

<https://www.mongabay.co.id/2016/09/05/amerika-dan-tiongkok-meratifikasi-paris-agreement-apa-pengaruhnya-untuk-indonesia/> (diakses 10 Mei 2019)

<sup>10</sup> Rojer Pielker Jr. “Climate Change as Symbolic Politics in United States”. #IEEJ Journal, Oktober 2017. Hal 3

kepresidennya Trump menjelaskan “kita akan melakukan negosiasi ulang, jika mereka setuju dengan itu maka itu bagus jika tidak, AS akan baik-baik saja.”<sup>11</sup>

Protes mengenai keluarnya AS dari *Paris Agreement* kembali terjadi setelah Trump mengumumkan keputusannya itu. Protes besar dilakukan oleh elit bisnis AS dengan mengeluarkan surat terbuka yang berisi dorongan kepada Trump untuk tetap loyal pada *Paris Agreement* karena meratifikasi *Paris Agreement* berarti mendorong bisnis dan investor menginvestasikan jutaan dollar ke dalam investasi *low carbon* yang bernilai triliunan juta dolar.<sup>12</sup> Proposal ini dinilai diperlukan dunia untuk menerapkan energi ramah lingkungan demi kesejahteraan semua orang. Surat terbuka ini ditanda tangani sejumlah perusahaan yaitu DuPont, eBay, Nike, Unilever, Levi Strauss & Co, Starbucks, General Mills, Hewlett Packard and Hilton.<sup>13</sup>

Sejalan dengan itu, beberapa negara bagian AS menunjukkan protes dengan melakukan mitigasi perubahan iklim bersama negara lain. Setelah deklarasi Trump, Gubernur California, New York, dan Washington bergabung bersama untuk membentuk Aliansi Iklim AS, untuk menjalankan target *Paris Agreement*.<sup>14</sup> Kebijakan ini menyebabkan negara bagian dan kota lainnya di AS harus menyiapkan lebih dari \$6,5 triliun dari PDB atau setara dengan 30% total PDB AS karena dana tersebut tidak lagi diberikan oleh pemerintah federal.

---

<sup>11</sup> Whitehouse, “Statement President Trump Paris Climate Accord”, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-Trump-paris-climate-accord/> (diakses tanggal 6 Mei 2019)

<sup>12</sup> 21 Daniel Farber A. US “Climate Policy : Obama to Trump and Beyond” (RECHTD), 10# Climate Policy. Agustus 2018. hal 2

<sup>13</sup> Daniel Farber, hal 2

<sup>14</sup> Milan Elkerbout. Climate, “Trump’s Paris Exit A Blow to Climate Politics, But a a Boon to Regional Climate Policy?”. 15 Juni 2017. hal 2

California bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan menandatangani sebuah perjanjian dengan China untuk bekerja sama dalam hal perubahan iklim.<sup>15</sup>

Adanya penolakan dari mayoritas masyarakat AS sendiri terus datang akibat naiknya kesadaran isu lingkungan di AS. Menurut *Gallup*, salah satu lembaga *polling* terkemuka di AS, pada tahun 2017 persentasi warga AS yang khawatir terhadap isu lingkungan naik menjadi 66% dari sebelumnya 63%.<sup>16</sup> Bahkan dari kalangan partai Republik (partai politik Trump) terjadi kenaikan pendukung kuat (partisan) ke angka 18% dari yang sebelumnya 16%.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan terdapat golongan Republikan yang juga khawatir tentang isu pemanasan global, atau perubahan iklim. Hal yang sama juga terjadi di dalam pemerintahan Trump sendiri dimana Penasehat Ekonomi Trump yaitu Elon Musk merupakan adalah CEO dari Tesla Motor dan Space X, mundur dari dewan penasehat Trump karena tidak sepakat dengan keputusan AS untuk keluar dari *Paris Agreement*.<sup>18</sup>

Sedangkan di tingkat internasional, banyak negara yang menyesalkan keputusan ini dan pidato kenegaraan yang berisi kekecewaan sebagai respon terhadap keputusan Trump. Salah satunya datang dari Macron Perdana Menteri Prancis yang memberikan pidatonya bertajuk "*Make our Planet Great Again*"<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Milan Elkerbout, hal 2

<sup>16</sup> Rojer Pielke Jr.. "Climate Change as Symbolic Politics in United States". #IEEJ Journal, Oktober 2017. Hal 11

<sup>17</sup> Ibid, Hal 12

<sup>18</sup> Maggie Mcgrath."Elon Musk Quits Whitehouse Advisory Councils in Wake of Trumps Decision to Pull Out of Paris Climate Accord".Forbes. Juni 01, 2017. <https://www.forbes.com/sites/ /2017/06/01/elon-musk-quits-white-house-advisory-councils-in-wake-of-Trumps-decision-to-pull-out-of-paris-climate-accord/#5c0044d96740> (diakses tanggal 6 Mei 2019)

<sup>19</sup> Sophie Tatum, "Macron's call to 'Make our Planet Great Again' attracts six more US-based scientists".<https://edition.cnn.com/2018/05/02/politics/make-our-planet-great-again-macron/index.html> (diakses tanggal 6 Mei 2019)

Munculnya protes terhadap keputusan keluar dari kalangan pebisnis, negara bagian, masyarakat AS, golongan partai, penasehat ekonomi, hingga dari dunia internasional, faktanya tidak membuat Trump mengubah keputusannya. Hingga tahun 2019, tidak pernah terjadi negosiasi ulang apapun antara AS terhadap *Paris Agreement*.

Keputusan Trump yang mengabaikan agenda rintisan oleh rezim Barack Obama dan penolakan yang datang dari warga AS sendiri, menunjukkan pandangan atau persepsi Donald Trump terhadap isu lingkungan sangat berbeda dengan Barack Obama. Lebih lanjut, persepsi tersebut juga membentuk pandangan dan gaya kepemimpinan yang khas (inkoperatif) terhadap *Paris Agreement*. Oleh karena itu, persepsi Donald Trump yang akhirnya membuat AS keluar dari *Paris Agreement* menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perjalanan mulai dari periode kampanye hingga menjadi presiden menunjukkan dominasi individu Trump terhadap *Paris Agreement*. Diabaikannya semua input kebijakan luar negeri seperti kelompok kepentingan, negara bagian, pebisnis hingga dewan penasehat, menunjukkan adanya cara pandang atau persepsi tersendiri dari Donald Trump dalam membuat keputusan untuk membuat AS keluar dari *Paris Agreement*. Oleh karena itu, persepsi Donald Trump dalam kebijakan luar negeri AS untuk keluar dari *Paris Agreement* menjadi suatu yang fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut: **Bagaimana persepsi Donald Trump dalam kebijakan luar negeri AS untuk keluar dari *Paris Agreement* ?**

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi Donald Trump dalam merumuskan kebijakan luar negeri AS untuk keluar dari *Paris Agreement*

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis penelitian ini akan menambah referensi kepustakaan terkait kajian kebijakan luar negeri AS.
2. Secara teoritis penelitian ini akan menjadi model yang mendukung teori dan konsep persepsi individu dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

#### 1.6 Kajian Pustaka

Dalam proses menganalisis masalah dan mencari jawaban masalah, penelitian ini bersandar kepada literatur dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan acuan.

Kajian pertama dilakukan oleh Rojer Pielker Jr dalam tulisannya *Climate Change as Symbolic Politics*. Pielker menjelaskan bahwa kebijakan iklim AS sangat tidak menentu dan cair karena menjadi isu partisan. Kembalinya kepemimpinan Republikan di gedung putih memunculkan gerakan untuk membatalkan upaya aksi iklim yang telah dilakukan oleh rezim sebelumnya, yaitu pada masa Obama. Disisi lain karena isu lingkungan sering kali hanya menjadi simbol politik dari pada kebijakan yang kongkrit.<sup>20</sup>

Untuk mendukung analisisnya ini, Pielker membandingkan bagaimana

---

<sup>20</sup> Rojer Pielk Jr. "Climate Change as Symbolic Politics in United States". #IEEJ Journal, Oktober 2017.

pidato kampanye Trump Vs Clinton dan juga pidato Obama dengan Trump pada saat mengumumkan posisi AS dalam *Paris Agreement*. Menurut Pielker, aktor yang paling sering mengeksploitasi isu lingkungan sebagai simbol dan alat meraih kepentingan (suara) sepanjang periode kampanye adalah Donald Trump. Contoh, di Maret 2017 saat di markas Agensi Proteksi Lingkungan AS- pemerintah federal pengaturan karbondioksida- President Trump mengadakan sebuah seremonial yang mengapresiasi penambang batu bara yang Trump sebut sebagai Executive Order. Dalam pidatonya Trump menyebut : *I want to acknowledge the truly amazing people behind me on this stage: our incredible coal miners. (Applause.) We love our coal miners. Great people. . . We will put our miners back to work.*”

Poin Trump sangat kontras dibanding Clinton selama 2016 ketika periode kampanye dimana ia menjanjikan ekonomi yang ramah lingkungan dan dalam debat di TV Clinton mengungkapkan ;

*we're going to put a lot of coal miners and coal companies out of business. . . And we're going to make it clear that we don't want to forget those people. Those people labored in those mines for generations, losing their health, often losing their lives to turn on our lights and power our factories. Now we've got to move away from coal and all the other fossil fuels, but I don't want to move away from the people who did the best they could to produce the energy...*

Dari dua pidato diatas dapat dilihat perbedaan simbolis yang jelas dimana Trump menggunakan pilihan kata “our coal miner” yang artinya penambang batu bara kita kemudian menambahkan ungkapan “love” artinya yang Trump cintai. Sedangkan Clinton menggunakan kata-kata “Those people” yang artinya orang-orang itu dan dilanjutkan dengan “did the best they could” yang mereka bisa. Dari ungkapan Clinton kita dapat melihat adanya jarak yang cukup jauh yang secara tidak sadar ditunjukkan antara Clinton dan penambang batu bara AS.

Kajian kedua dilakukan oleh Milan Elkerbout yang berjudul *Trump's Paris Exit A blow to Climate Politics, But A Boon to Regional Climate Policy?* Elkerbout dalam tulisannya menguraikan bagaimana respon kawasan setelah keluarnya AS dari *Paris Agreement*. Pertama, Elkerbout menjelaskan kemungkinan skenario yang akan terjadi apabila Trump mengikuti proses keluar sesuai mekanisme *Paris Agreement* dimana menurutnya, penarikan AS dapat benar-benar penuh pada pemilu AS tanggal 3 November 2020. Ketika calon Presiden baru menerima tampuk kekuasaan untuk beberapa minggu setelah pemilu 2020, tidak ada yang dapat memungkinkan presiden terpilih untuk membalikkan keadaan setelah 1 hari menduduki gedung putih.

Lebih lanjut, Elkerbout menjelaskan adanya penolakan yang muncul dari berbagai kalangan contohnya dari kalangan penasehat Trump Elon Musk dan diplomat senior David Rank, yang mengundurkan diri karena protes terhadap keputusan Trump keluar dari *Paris Agreement*. Sedangkan yang menjadi inti dari tulisannya yaitu perlawanan dari negara bagian kepada Trump, dalam tulisannya Elkerbout menjelaskan bahwa banyak negara bagian yang mengumumkan bahwa mereka akan tetap patuh pada *Paris Agreement*. Setelah deklarasi Trump, Gubernur California, New York, dan Washington bergabung bersama untuk membentuk Aliansi Iklim AS, yang secara eksplisit merujuk pada komitmen *Paris Agreement*. Selain itu, banyak negara federal dan kota di AS setelah bergabung pada aliansi atau mengekspresikan dukungan ke *Paris Agreement* dengan cara lain, dengan hasil dimana pemerintah regional bertanggung jawab untuk lebih dari \$6,5 triliun dari PDB (dari 30% total PDB AS) telah putus dengan kebijakan iklim pemerintah federal. California bahkan melangkah lebih

jauh lagi dengan menandatangani sebuah perjanjian dengan China untuk bekerja sama dalam hal perubahan iklim. Meningkatnya ketegasan badan-badan regional di AS juga dapat membuka lainnya jalan kerjasama untuk pemerintah daerah di tempat lain di dunia, yang akan menjadi anugerah untuk aksi iklim regional *bottom-up*.<sup>21</sup>

Kendati demikian, Elkerbout melihat bahwa tanpa partisipasi AS, politik iklim internasional akan melakukannya menghadapi banyak hambatan, dimana target yang awalnya sangat ambisius, bisa saja tidak se-ambisius seharusnya.

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh *German Watch* dengan judul *The Last Battle of Fossil Lobby*. Riset kompilasi ini mengungkapkan bahwa terdapat mis-informasi atau kebenaran yang hanya parsial pada Trump sehingga menimbulkan misinterpretasi tentang *Paris Agreement*.<sup>22</sup> Hal ini dianalisis oleh Christoph Bals and Katharina Hierl dengan cara memeriksa relevansi setiap alasan yang diberikan Trump untuk mendukung keputusannya keluar dari *Paris Agreement*.

Contohnya analisis pertama tentang *Paris Agreement* mengancam pekerjaan warga AS, Christoph Bals and Katharina Hierl menjelaskan bahwa fakta lapangan menunjukkan pertumbuhan energi solar 17x kali lebih cepat dari pada ekonomi AS secara keseluruhan, pekerjaan sebagai teknisi turbin angin sangat cepat tumbuh di AS karena adanya *Clean Power Plan*, yang diperkenalkan oleh rezim sebelumnya. Selain itu, berdasarkan kalkulasi biaya, *Clean power*

---

<sup>21</sup> Milan Elkerbout. Climate, "Trump's Paris Exit A Blow to Climate Politics, But A Boon to Regional Climate Policy?". 15 Juni 2017.

<sup>22</sup> Christoph Bals and Katharina Hierl. The last Battle of Fossil Lobby A compilation. German Watch.

*energy* juga akan menghemat sekitar 1,886 USD dalam 15 tahun untuk kebutuhan energi rata-rata di AS.

Kemudian, klaim Trump tentang China dimana Trump menuding China akan menjadi kompetitor yang akan diperbolehkan oleh mekanisme *Paris Agreement* untuk dapat meningkatkan emisi sampai 13 tahun kedepan dan melakukan apapun yang mereka inginkan (karena China tidak meratifikasi hasil Copenhagen Summit). Akan tetapi, Christoph Bals and Katharina Hierl menambahkan Trump tidak memahami bahwa China di dalam *Paris Agreement* telah berkomitmen untuk tidak meningkatkan emisi sama sekali setelah 2030 dan emisi CO<sub>2</sub> per unit PDB akan berkurang sekitar 60-65%. Fakta lain juga menunjukkan emisi China justru tidak meningkat selama tiga tahun belakang karena China merencanakan kapasitas energi terbarukan yang lebih besar hingga tahun 2030. Kapasitas ini akan lebih besar dari pada kapasitas generator keseluruhan yang dimiliki oleh AS saat ini.

Disamping itu, Christoph Bals and Katharina Hierl juga menjawab klaim Trump tentang kerugian ekonomi, Trump akan menciptakan lapangan kerja baru setelah keluar dari *Paris Agreement*, dan tidak adilnya *Paris Agreement* menurut Trump, dengan jawaban yang sebaliknya. Sehingga, pada akhir tulisannya Christoph Bals and Katharina Hierl menyimpulkan bahwa Trump pada pidatonya banyak mengandung *misguiding* yang pada akhirnya memperburuk perjuangan lobby penggunaan fosil di era pemerintahan Trump.

Literatur ke-empat berjudul *US Domestic and International Climate Policy Under President Trump* yang ditulis Oleh Frank Jotzo, Joana Depledge & Harald Winkler. Terdapat beberapa kebijakan yang diubah oleh Trump di level domestik

Trump membatalkan *Clean Energy Plan* yang dirintis oleh Barak Obama. Sedangkan pada tingkat Internasional, Trump memberhentikan pendanaan *Green Climate Fund* (GCF). Periode terakhir Obama, AS telah mentransfer dua kali sebanyak \$ 500 juta ke IMF (yang berarti total pembayaran AS ke GCF hingga saat ini menjadi \$ 1 miliar, dari \$ 3 miliar yang dijanjikan). Tetapi Presiden Trump telah menggunakan janji AS ini sebagai argumen utama mengapa AS menarik diri dari *Paris Agreement*. Ini berarti sokongan dana GCF tidak akan dilanjutkan Trump.<sup>23</sup>

Kesimpulan dari Frank Jotzo, Joana Depledge & Harald Winkler dalam analisis mereka adalah keluarnya AS dari *Paris Agreement* membuat beban tersendiri bagi negara yang masih tergabung. Jika dunia menarget limitasi kenaikan suhu maksimal 2°C maka tidak ada ruang bagi negara lain untuk melakukan negosiasi ulang.

Terakhir, kajian kelima yang dilakukan oleh Carbon Delta yang berjudul *Is Trump Right or Wrong to Withdraw from the Paris Agreement?* ditulis oleh David Lunsford, Oliver Marchand, Elke Schaper, Sara Stocker, dan Amir Habchi. Dalam tulisan ini Carbon Delta menjelaskan dengan menggunakan model dan analisis komparatif yang mengukur pengaruh ekonomi terhadap AS, China, dan negara Uni Eropa (UE). Carbon Delta berupaya menguji apakah Trump memiliki alasan yang absah tentang klaim bahwa *Paris Agreement* tidak adil bagi AS. Berdasarkan hasil penelusuran Carbon Delta menjelaskan bahwa dalam poin

---

<sup>23</sup> US Domestic and International Climate Policy Under President Trump by Frank Jotzo, Joana Depledge & Harald Winkler

tertentu Trump dapat dikatakan benar, namun juga dapat disalahkan untuk beberapa hal.<sup>24</sup>

Adapun poin benar dari Trump adalah 5 tahun pertama penjalanan *Paris Agreement*, beban ekonomi yang harus ditanggung AS akan jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh luas hutan lindung AS yang sangat sedikit.

Akan tetapi, meskipun pada data dan poin tentang beban ekonomi Trump dapat dikatakan benar, secara esensial, Trump juga dapat disalahkan. Ketika membandingkan biaya pengurangan emisi dalam jangka panjang, China dan India akan mendekati level pengeluaran AS sekitar tahun 2035. Pada tahap ini, China dan India harus mencapai pengurangan gas emisi yang lebih besar sebagai negara berkembang (sebagaimana mekanisme *Paris Agreement*), karena peluang yang lebih murah telah habis. Menurut Carbon Delta, pada tahun 2050, China dan India akan mengalami beban biaya yang lebih besar dari pada apa yang harus ditanggung AS di 5 tahun pertama meskipun populasi dan industri negara ini terus bertumbuh. Di tahun 2050, AS dan UE akan tertinggal jauh oleh India dan China dan upaya keras dari China dan UE untuk memenuhi target jangka panjang dari perjanjian Paris yaitu stabilisasi dibawah 2°C.

Dari kajian diatas dapat dilihat bahwa belum adanya kajian mengenai persepsi Donald Trump sebagai Presiden, membuat (*research gap*) celah riset pada khazanah ilmu hubungan internasional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengisi celah riset sebagai upaya penulis berkontribusi dalam ilmu hubungan internasional.

---

<sup>24</sup> Is Trump Right or Wrong to Withdraw from the *Paris Agreement*? BY David Lunsford, Oliver Marchand, Elke Schaper, Sara Stocker, Amir Habchi *June, 2017 - Zürich, Switzerland*

## 1.7 Kerangka Konsep

Dalam mengamati kasus pada penelitian ini penulis menggunakan sebuah kerangka konsep yang terdiri dari dua konsep utama yaitu konsep kebijakan luar negeri dan persepsi. Dua konsep tersebut penting untuk digunakan karena akan menjadi alat analisis penulis dalam menjelaskan permasalahan yang akan dijawab.

### 1.7.1 Kebijakan Luar Negeri

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton kebijakan luar negeri adalah strategi yang disusun oleh sebuah negara melalui pembuat kebijakan berdasarkan kepentingan nasional negaranya yang dioperasikan dalam dinamika politik internasional untuk menghadapi entitas politik lain.<sup>25</sup> Adapun yang menjadi kepentingan nasional dari suatu negara adalah segala hal yang dianggap penting bagi masyarakat maupun pemimpin di negara tersebut.<sup>26</sup> Menurut Lentner, suatu kebijakan luar negeri yang telah disahkan dapat sewaktu-waktu berubah apabila kondisi dari lingkungan sekitar mempengaruhi pandangan pembuat kebijakan tentang apa yang kemudian menjadi penting bagi negaranya.<sup>27</sup> Lebih lanjut, Lentner menambahkan bahwa faktor-faktor dari lingkungan dapat berasal dari perubahan struktur pemerintahan baru, dominasi kelompok elit tertentu, atau perubahan persepsi dan tujuan dalam proses pembuatan keputusan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Jack C plano dan Roy Olton alih bahasa oleh Wawan Juanda, *The International Relations Dictionary* 3rd ed (England : Clio Press Ltd, 1982), P 5

<sup>26</sup> Moctar Mas' oed, *Ilmu hubungan internasional, disiplin dan metodologi* (Jakarta LP3ES, 1994), p 184

<sup>27</sup> Howard Lentner, *Foreign Policy Analysis : A comparative Conceptual Approach* (Ohio ; Bill and Howel Co, 1974) p 173

<sup>28</sup> Howard Lentner p 176

Menurut Yayan M Yani dan A.A Banyu Perwita dalam proses perumusannya kebijakan luar negeri memiliki beberapa sumber masukan (input) utama diantaranya.<sup>29</sup> ;

1. Sumber sistemik (*systemic source*)

Sumber sistemik atau *Systemic source* merupakan input yang bersumber dari luar wilayah suatu negara atau lingkungan eksternal. Interaksi antar negara pada struktur sistem internasional akan menciptakan situasi tertentu yang kemudian menjadi pertimbangan tersendiri untuk suatu negara dalam menentukan sikap politik internasionalnya melalui kebijakan luar negeri.

2. Sumber masyarakat (*societal source*)

Sumber Masyarakat atau *societal source* adalah input kebijakan luar negeri yang bersumber dari wilayah internal suatu negara yaitu masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sebagai input kebijakan memiliki beberapa faktor yang juga mempengaruhinya seperti struktur sosial, perubahan opini publik, pembangunan ekonomi, sejarah dan kebudayaan. Struktur sosial dan perubahan opini publik merupakan faktor yang meliputi SDM, harmoni, dan sentimen masyarakat di suatu negara. Pembangunan ekonomi meliputi kapasitas negara memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Sering kali kepentingan tersebut menjadi acuan negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Sedangkan sejarah dan budaya meliputi tentang bagaimana pengalaman masa lalu mempengaruhi pola

---

<sup>29</sup> Yayan M. Yani dan A.A Banyu Perwita, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2005) p 49

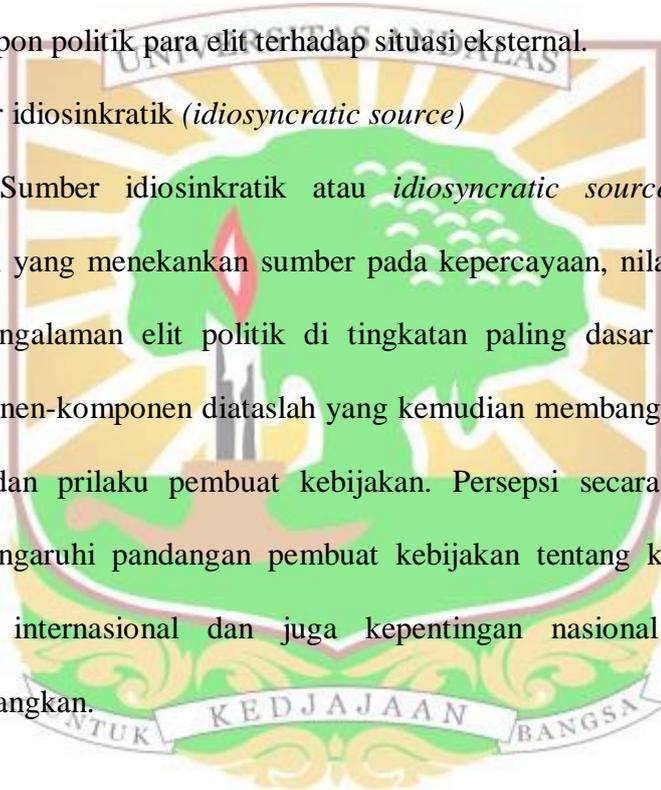
interaksi masyarakat masa sekarang serta norma, tradisi, dan nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

3. Sumber pemerintahan (*governmental source*)

Sumber pemerintahan atau *governmental source* merupakan input internal yang bersumber dari pemerintahan suatu negara meliputi struktur pemerintahan dan pertanggungjawaban para elit politik. Pertanggungjawaban politik mencakup seperti kompetisi partai, pemilu, dan respon politik para elit terhadap situasi eksternal.

4. Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic source*)

Sumber idiosinkratik atau *idiosyncratic source* adalah input internal yang menekankan sumber pada kepercayaan, nilai, keperibadian, dan pengalaman elit politik di tingkatan paling dasar yaitu individu. Komponen-komponen di ataslah yang kemudian membangun persepsi, cara pikir, dan perilaku pembuat kebijakan. Persepsi secara khusus akan mempengaruhi pandangan pembuat kebijakan tentang keadaan alamiah sistem internasional dan juga kepentingan nasional yang hendak diperjuangkan.



Apabila keempat sumber input di atas dikaitkan dengan kasus keluarnya AS dari *Paris Agreement*, maka dapat dijastifikasi bahwa sumber idiosinkratik pada tingkatan individu -Donald Trump- merupakan sumber yang paling dominan. Hal ini dapat diamati dari beberapa kondisi yang muncul selama proses perumusan kebijakan AS ;

- a) Munculnya pernyataan dari negara-negara yang menyesalkan keputusan AS untuk keluar dari *Paris Agreement*, tetap membuat AS membatalkan ratifikasi di *Paris Agreement*.
- b) Pengunduran diri penasehat ekonomi AS Elon Musk yang merupakan wujud protes terkait kebijakan Trump, tidak membuat AS kemudian membatalkan keputusan keluar dari *Paris Agreement*.
- c) Penolakan dan protes dari sebagian masyarakat AS yang percaya kepada perubahan iklim, tidak terlalu mempengaruhi keputusan AS untuk keluar dari *Paris Agreement*.

Dengan kata lain, dari tiga kondisi di atas sumber sistemik, pemerintah, maupun masyarakat bukanlah sumber yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan AS keluar dari *Paris Agreement*. Oleh karena itu, sumber idiosinkratik yang berada pada level individu dalam perumusan kebijakan luar negeri AS untuk keluar dari *Paris Agreement* sangat dominan.

### 1.7.2 Persepsi

Menjelaskan sebuah keputusan yang sangat krusial tidak mungkin tanpa mengacu pada kepercayaan pembuat keputusan (individu) tentang tatanan dunia dan citra aktor lain. Secara khusus, sejumlah ahli ilmu hubungan internasional memiliki pendapatnya masing-masing mengenai persepsi. Menurut Daniel S.Papp, persepsi adalah sebuah konsep relatif yang ditentukan oleh pengalaman masa lalu, ekspektasi masa sekarang, ketakutan maupun keinginan yang dipengaruhi dari orang lain, dan faktor-faktor lain yang mungkin terlibat. Hal terpenting adalah setiap orang memiliki Interpretasi mengenai situasi yang

berbeda satu sama lain.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Janies Gross Stein, persepsi adalah proses menangkap secara indrawi, mengenali, serta memproses apa yang ditangkap.<sup>31</sup> Berbeda dengan kedua ahli di atas Jhon E Maroz memaknai persepsi sebagai pemahaman dan kesadaran diri terhadap peristiwa, situasi, atau proses. Pemahaman dan kesadaran diri ini pada dasarnya akan mempengaruhi sikap pada suatu hal.<sup>32</sup> Berdasarkan tiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi bersifat dinamis karena tergantung pada proses penangkapan indrawi dan proses Interpretasi oleh individu tersebut. Namun sampai disini, definisi mengenai persepsi belum dapat menjelaskan secara eksplisit komponen apa saja yang menjadi kunci dalam membentuk persepsi seorang individu.

Adalah Robert Jervis seorang ahli hubungan internasional yang dapat menjelaskan komponen kunci yang dimaksud dalam bukunya berjudul *perception and misperception in international politics*. Dalam kalimatnya Jervis mengatakan<sup>33</sup>

“[...] faktor yang terlibat dalam pembentukan persepsi adalah belief (kepercayaan), image (citra) dan intention (niat). [...] Persepsi melibatkan proses menghadapi sesuatu dimana seorang aktor akan membangun pemahaman (belief) tentang image (citra) aktor lain, dan prediksi tentang apa yang aktor lain ingin lakukan dalam keadaan tertentu (intention). [...] intention atau niat adalah aksi yang diharapkan pengamat (observer) untuk diambil oleh aktor lain di dalam keadaan tersebut.”

Dengan kata lain, persepsi terbentuk dari proses mengamati dan berfikir seorang individu tentang *belief* (kepercayaan), *image* (citra), dan *intention* (niat) aktor lain.

---

<sup>30</sup> Daniel S Paap “Contemporary International Relation Framework for Understanding” (Second Edition), (New York Macmillan Publishing Company) 1998. P 155

<sup>31</sup> Janies Gross Stein. Threat Perception in International Relations. ( Oxford : Oxford University Press) 2013 p 1

<sup>32</sup> Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, Analisis Konstruktivisme Tentang Persepsi Ancaman. Jurnal Global dan Strategis, Vol 7, No 1, hal 5

<sup>33</sup> Robert Jervis, Perception and Misperception in international politics, (New Jersey: Princeton University Press) 1976

*Belief* memiliki makna yaitu sesuatu yang dipercayai oleh seorang aktor terhadap aktor lain. Individu yang memiliki kepercayaan tertentu akan cenderung menolak semua informasi yang tidak konsisten dengan kepercayaan yang merupakan kepercayaan inti mereka. Seperti yang Jervis argumentasikan “dengan kecenderungan struktur kepercayaan individu dan konsistensi, individu akan cenderung percaya bahwa negara akan menyukai apa yang ia sukai, mendukung apa yang ia dukung, melawan apa yang hendak ia lawan.”

*Image* (citra) adalah gambaran mengenai dari perilaku aktor lain.<sup>34</sup> Gambaran ini normalnya didapatkan oleh individu dari informasi yang berkaitan dengan objek yang sedang diobservasi. Jika individu dan aktor yang sedang diobservasi berada pada situasi yang sama, maka masing-masing pihak dapat memprediksi apa yang akan dilakukan satu sama lain.<sup>35</sup>

Sedangkan *Intention* (niat) adalah prediksi perihal tindakan apa yang suatu aktor ambil dalam keadaan-keadaan tertentu. Jervis menekankan bahwa niat disini adalah aksi kolektif yang dilakukan oleh individu karena adanya prediksi tertentu dari negara lain, tentang bagaimana behave atau tindakan negara yang individu pimpin. Oleh karena itu melihat niatan yang ditangkap oleh individu didasari oleh dua proses ;

1. Membedakan sumber internal dan eksternal (bagaimana perilaku negara terkait kendala situasional dan seberapa besar ambisi yang ditunjukkan oleh tindakan sebelumnya).

---

<sup>34</sup> Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics*, (New Jersey: Princeton University Press) 1976 hal 28

<sup>35</sup> Robert Jervis, hal 32

2. Tidak berfokus kepada bagaimana suatu negara akan bertindak, melainkan berfokus kepada bagaimana suatu negara memprediksikan akhir dari tindakan negara lain.

Dalam perumusan kebijakan luar negeri, *belief* dan *image* mempunyai peran sentral dalam membentuk persepsi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pada awal proses mengamati dan berfikir tentang aktor lain, seorang pembuat kebijakan akan berangkat dari pengalaman dan pemahaman pribadinya. Berdasarkan pemahaman pribadi inilah terbentuk *image* tentang aktor lain, dan pada akhirnya memunculkan suatu prediksi mengenai apa yang sebenarnya aktor lain ingin lakukan melalui sebuah tindakan dalam keadaan yang berlangsung saat itu.

Persepsi dapat juga dikatakan turunan dari idiosinkratik dimana keduanya sama-sama berada pada tingkat analisa individu. Persepsi maupun konsep besarnya (idiosinkratik) dapat menjelaskan keterkaitan individu dengan proses perumusan kebijakan luar negeri. Namun, dikarenakan terlalu luas dan kompleksnya idiosinkratik, maka pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep turunan idiosinkratik yaitu persepsi guna membantu menentukan fokus, pengaruh, serta prioritas pada kasus penelitian. Dengan kerangka konsep persepsi dan kebijakan luar negeri, pada penelitian ini penulis akan melihat bagaimana persepsi Donald Trump dalam perumusan kebijakan luar negeri AS keluar dari *Paris Agreement*.

Menarik untuk dicatat bahwa dalam kerangka konsep Rober Jervis yaitu persepsi, terdapat revisi khusus yang dimaksudkan untuk menganalisa kasus

kepresidenan Donald Trump. Dalam esainya berjudul *Presiden Donald Trump and IR Theory*, Jervis menjelaskan bahwa walaupun sebelumnya tradisi neorealis tidak dapat menggambarkan bagaimana menggambarkan metode penelitian yang berfokus pada individu, maka lewat esai ini Jervis menekankan bahwa terdapat sebuah spektrum individu yang dimungkinkan dalam menggambarkan konsep persepsi pada level individu terkhusus pada kasus kepresidenan Trump.

Jervis memulai penjelasannya dengan berangkat dari skema pengorganisasian level analisis dari Kenneth Waltz dan J David Singer. Bagi Waltz dan Singer, terdapat tiga level dalam menganalisa yaitu individu-individu, negara, dan sistem internasional (walaupun menurut Jervis sendiri, level birokrasi perlu juga ditambahkan).<sup>36</sup> Analisis Waltz pada tingkatan individu berfokus pada sifat manusia, namun sebagian besar analisis lanjutannya berfokus pada sejauh mana kepribadian dan preferensi politik mempengaruhi kebijakan luar negeri negara. Hal ini dapat diuji dengan melihat seberapa berpengaruh individu dalam membuat kebijakan negaranya. Pengaruh disini disandarkan pada kondisi bagaimana dominasi individu dapat mengalahkan tekanan domestik, internasional, serta birokrasi yang ada dinegaranya, sehingga individu berkuasa secara luas melalui kebijakannya.<sup>37</sup> Dengan kata lain, Trump dapat dianalisis sebagai individu selama dominasi Trump dalam kebijakan luar negeri dapat dibuktikan setara untuk dapat mewakili negara sebagai aktor utama.

---

<sup>36</sup> Jervis, Robert. "Policy Series; President Trump and IR Theory".  
<https://issforum.org/roundtables/policy/1-5b-jervis> (diakses tanggal 29 Juli 2019)

<sup>37</sup> Ibid

## 1.8 Metode Penelitian

Metode atau metodologi adalah seperangkat prosedur tentang bagaimana suatu pengetahuan mengenai suatu penelitian diperoleh yang digunakan oleh seorang peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.<sup>38</sup> Sedangkan penelitian memiliki defenisi yaitu kegiatan pencarian kebenaran yang terencana secara sistematis dan dilakukan berdasarkan metode ilmiah.<sup>39</sup> Umumnya penelitian memiliki dua kompenen kusus dalam subtsansinya yaitu observasi empiris dan logika.<sup>40</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa meode penelitian merupakan seperangkat prosedur yang terencana, sistematis, dan dilandasi metode ilmiah untuk menemukan kebenaran tentang sesuatu.

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian dimana penulis akan menggunakan elaborasi verbal dalam menjelaskan temuan-temuan terkait penelitiannya. Hasil atau temuan ini akan dihimpun dari data-data berbagai sumber yang telah diInterpretasikan dengan tujuan menemukan makna pada data tersebut.<sup>41</sup>

Untuk jenis penelitian, penulis menggunakan jenis deskriptif analisis yang menjabarkan secara deskriptif mengenai kasus yang sedang dikaji melalui ucapan tulisan atau tingkah laku suatu pihak. Adapun tujuan dari dipilihnya jenis

---

<sup>38</sup> Maria S.W Sumarjono 2-3

<sup>39</sup> Maria S.W Sumarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Yogyakarta; 1989) 27

<sup>40</sup> Ibid 27

<sup>41</sup> Gumilar Rusmliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, *Jurnal Socio Humaniora*, Vol 9 No. 2 (2005) hal 8

penelitian ini adalah agar pembaca dapat lebih mudah memahami gambaran proses pembuatan kebijakan luar negeri AS untuk keluar dari *Paris Agreement*.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk menetapkan fokus dan hal-hal yang menjadi prioritas dalam penelitian ini, penulis menerapkan batasan masalah yaitu pada tahun 2015 hingga 2017. Periode ini dipilih sesuai dengan waktu AS meratifikasi *Paris Agreement* tepatnya pada tahun 2015 dan kemudian membatalkan ratifikasi pada tahun 2017.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisa

Penelitian ini mengadopsi individu sebagai unit analisa. Individu dipilih untuk dianalisis karena dalam proses pembuatan keputusan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari posisi strategis dan otoritas yang menyertai individu seperti presiden atau perdana menteri.<sup>42</sup> Diabaikannya sumber input sistemik, pemerintah, dan masyarakat dalam perumusan kebijakan AS keluar dari *Paris Agreement* oleh Trump merupakan bukti dominasi individu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Pada tingkatan analisa, penulis kembali menyoroti individu sebagai fokus penelitian. Hal ini dikarenakan anomalnya tindakan suatu negara disaat mayoritas aktor internasional lainnya bergerak pada arah yang berlawanan, juga disebabkan oleh Individu. Apabila dikaitkan pada keputusan AS keluar dari *Paris Agreement*, disaat negara-negara lain dan bahkan sebagian AS sendiri menyesalkan keputusan

---

<sup>42</sup> Janice Gross Stein. Foreign Policy Decision making; Rational, Psychological, and Neurological Model dikutip dalam buku Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dumne. Foreign Policy Theories: Actor & Cases (Oxford University Press, 2008) hal 113

tersebut, maka Trump kembali menjadi aktor paling dominan dalam dirumuskannya kebijakan ini.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis memilih studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Studi Pustaka adalah metode dimana peneliti akan mencari seluruh data terkait melalui bahan bacaan seperti buku, dokumen, arsip atau literatur berhubungan yang tersedia dalam perpustakaan.<sup>43</sup> Terdapat 2 sumber utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Pertama web resmi pemerintah AS yaitu [www.whitehouse.gov](http://www.whitehouse.gov) dan Biografi Donald Trump berjudul *Trump Revealed*. Selain sumber utama tersebut, penulis juga menggunakan sumber-sumber terkait lainnya seperti artikel jurnal, berita daring, dan laman situs resmi, dan penelitian-penelitian terdahulu terkait kasus penelitian.

Teknik studi pustaka membantu penulis mengumpulkan dan menganalisis data yang di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan subjektif dan informatif.<sup>44</sup> Dalam praktiknya, penulis mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan subjektif dan informatif dari pengalaman hidup Trump yang membentuk cara pandang tertentu. Pernyataan yang telah diklasifikasikan kemudian dikonfirmasi dengan pernyataan resmi kenegaraan Trump saat mengeluarkan kebijakan luar negeri AS keluar dari *Paris Agreement* untuk memastikan validitas analisis.

#### **1.8.5 Teknik Pengolahan Data**

Untuk teknik pengolahan data, penulis mengklasifikasikan data yang telah

---

<sup>43</sup> M. Nasir, *Metode penelitian* (Jakarta Galia Indonesia 2003) hal 27

<sup>44</sup> Marshall, Catrine dan Rossman, Gretchen B., *Designing Qualitative Research*. 3<sup>rd</sup>. Ed

dikumpulkan berdasarkan kategori-kategori tertentu.<sup>45</sup>

Kategori pada klasifikasi ditentukan berdasarkan kesesuaian data dengan variabel kerangka konsep persepsi yaitu *belief*, *image*, dan *intention*. Kategori-kategori ini dikelompokkan ke dalam sub pembahasan yang terdiri dari ; informasi tentang latar belakang Donald Trump, Hal-hal yang sebelumnya menjadi kewajiban AS dalam *Paris Agreement*, Komitmen-komitmen AS terkait proteksi lingkungan sebelum keluar dari *Paris Agreement*, keadaan sosial dan politik domestik AS, dan informasi tentang kepemimpinan Donald Trump selama kurang lebih 1 tahun pada kasus *Paris Paris Agreement*. Keseluruhan kategori data diatas menjadi gambaran utama mengenai arti penting untuk AS keluar dari *Paris Agreement* bagi Donald Trump.<sup>46</sup>

### 1. 8. 6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data untuk memperoleh suatu pola atau bentuk-bentuk keteraturan.<sup>47</sup> Data-data yang telah diorganisir, kemudian diinterpretasikan oleh penulis untuk mendapatkan sebuah temuan penelitian. Interpretasi dapat diartikan sebagai proses pemberian makna terhadap pola atau bentuk-bentuk keteraturan yang ditemukan.<sup>48</sup> Tahapan analisis data pada penelitian ini berangkat dari analisis mengenai persepsi Donald Trump terhadap *Paris Agreement* yang terdiri dari tiga komponen kunci menurut Robert Jervis yaitu *belief*, *image*, dan *intention*. Secara praktis, pada penelitian ini penulis

---

<sup>45</sup> Maria S.W Sumarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Yogyakarta: 1989) hal 24

<sup>46</sup> Milan Elkerbout, *Trump's Paris Exit A blow to climate politics, But A Boon to Regional Climate policy?* 2017

<sup>47</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung ; Remaja Karya , 1989) p 112-113

<sup>48</sup> Interpretasi data. Diakses dari <http://unj.academia.edu> (pada 20 November 2019)

mendeskripsikan hasil interpretasi data pada masing-masing komponen persepsi sehingga didapatkan kesimpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yaitu bagaimana persepsi Trump dalam perumusan kebijakan AS keluar dari *Paris Agreement*. Adapun tolak ukur penetapan intepretasi ke komponen kunci diatas yakni menyesuaikan antara konten interpretasi dengan defenisi komponen yang dijelaskan oleh Robert Jervis.

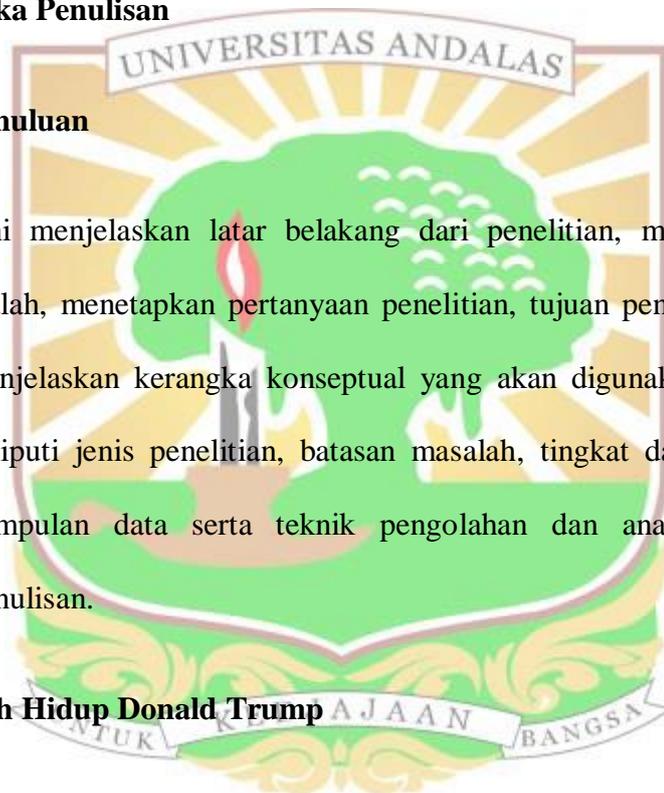
## **1.9. Sistematika Penulisan**

### **Bab 1. Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang dari penelitian, memformulasikan rumusan masalah, menetapkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, menjelaskan kerangka konseptual yang akan digunakan, metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, batasan masalah, tingkat dan unit analisis, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data, dan sistematika penulisan.

### **Bab 2. Sejarah Hidup Donald Trump**

Pada bab ini, penulis membahas sejarah hidup Donald sebelum menjabat sebagai presiden AS, mulai dari masa kecil, masa Trump merintis bisnis, masa transformasi Trump sebagai pebisnis menjadi politisi, hingga masa kampanye Trump menuju gedung putih.



### **Bab 3. Tentang *Paris Agreement***

Bab ketiga menjelaskan visi, misi, serta poin-poin penting yang ada pada *Paris Agreement*, serta apa yang membuat Perjanjian Paris berbeda dengan Kyoto Protocol. Disamping itu akan juga dijelaskan apa yang harus AS lakukan dalam *Paris Agreement* sebagai upaya memitigasi perubahan iklim.

### **Bab 4. Persepsi Donald Trump Dalam Perumusan Kebijakan Luar Negeri AS Keluar Dari *Paris Agreement***

Pada bagian ini, penulis akan memberikan analisis tentang persepsi Donald Trump yang dijelaskan dengan 3 komponen yaitu *Belief, Image, Intention* dalam melihat *Paris Agreement* dan kemudian memutuskan untuk keluar.

### **Bab 5. Penutup**

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian.

